



# RENCANA KERJA (RENJA) DPPKB TAHUN 2024



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA  
LUBUKLINGGAU

## Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, serta atas usaha dan kerjasama sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Kota Lubuklinggau Tahun 2024.

Penyusunan RENJA adalah suatu keharusan bagi setiap OPD dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh OPD pada satu tahun kedepan. Dalam penyelesaian Rencana Kerja (Renja) ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Lubuklinggau.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Lubuklinggau, 04 Agustus 2023

**Pt. KEPALA DINAS PP dan KB  
KOTA LUBUKLINGGAU**



**Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1983 0710 200112 2 001**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2023 dan Capaian Renstra .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	15
3.1. Visi, Misi DPPKB Kota Lubuklinggau.....	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	15
3.3. Program dan Kegiatan .....	17
BAB IV. PENUTUP .....	20



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah inidijabarkan ke dalam Rencana Kerja masing-masing OPD.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bidang Pengendalian Penduduk, Kependudukan, dan Keluarga Berencana merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Pengendalian Penduduk merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, guna mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

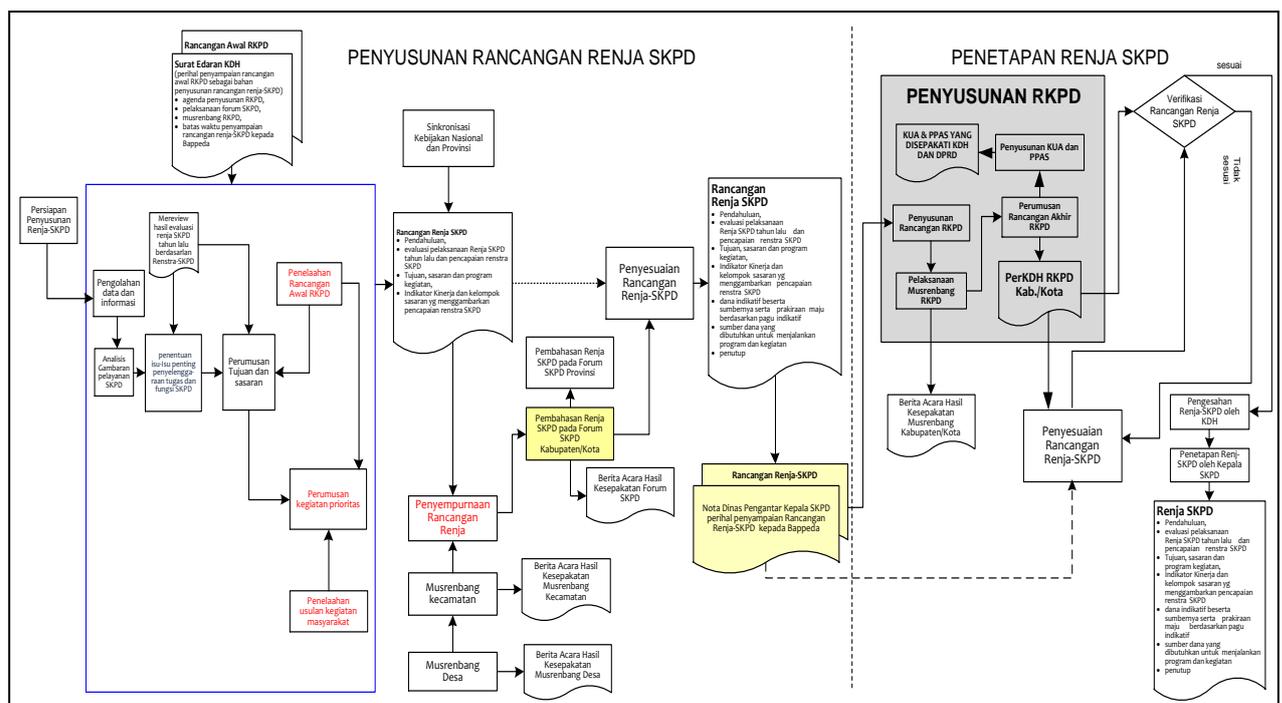
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024, pada dasarnya adalah pengkomunikasian Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Lubuklinggau di bidang Pengendalian Penduduk, Kependudukan dan Keluarga Berencana selama kurun waktu tersebut. Rencana Kerja DPPKB Kota Lubuklinggau memuat program



dan kegiatan prioritas, merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja OPD).

Sebagai penjabaran dari RPJMD dan renstra OPD, proses penyusunan Rencana Kerja OPD harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna terwujudnya sinergidan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing OPD untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaksud didalam indikator kinerja pada RPJMD.

GAMBAR 1.  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota



Untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk Kota Lubuklinggau sebagaimana dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026, maka disusunlah Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk dengan tetap mengacu kepada RPJM Kota Lubuklinggau 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau



2018-2023. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk tahun 2024 ini dilaksanakan melalui mekanisme / tahapan yang diawali dengan menampung usulan dan aspirasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan mulai dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kota serta menyelaraskannya dengan RPJMD Kota Lubuklinggau dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk tahun 2024 -2026.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RENJA ini meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau 2018-2023, secara umum telah memberikan arah dan tuntunan bagi Pemerintah Daerah khususnya DPPKB Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk, kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan. Isu-isu strategis dalam RPJMD Kota Lubuklinggau yang berkaitan/selaras dengan Program Pengendalian Penduduk, Kependudukan, dan Keluarga Berencana antara lain: Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk, Meningkatnya Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata.

Berkaitan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 sebagaimana yang dijelaskan di atas serta berdasarkan Indikator dan Target Kinerja yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan Visi Kota Lubuklinggau:

**“Terwujudnya Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan yang Madani.”**

Maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk Kota Lubuklinggau sebagai institusi yang mengemban tugas menyukseskan program Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk perlu menyelaraskan Visi dan Misinya dengan setidaknya mempertimbangkan tiga hal : **Pertama**, pasca disahkannya UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk Kota Lubuklinggau tidak lagi diamanatkan sebagai lembaga yang menangani KB semata, tetapi juga menangani masalah kependudukan. **Kedua** :Dalam rangka pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD maka dalam setiap pelaksanaan RENJA tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk, dimaksudkan untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Lubuklinggau sekaligus starting point sebagai dasar pijakan dan berguna sebagai bahan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk Kota Lubuklinggau ini adalah sebagai berikut:

1. *Maksud*

- a. menyediakan dokumen rencana teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Kependudukan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk.
- c. menyediakan alat bantu ukur kinerja dalam melakukan evaluasi pencapaian hasil pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk;



- d. RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk Kota Lubuklinggau ini menampung dan mempunyai kemampuan dalam mewujudkan sasaran pembangunan Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk yang sekaligus menjadi program prioritas di Kota Lubuklinggau.

## 2. Tujuan

- a. tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk yang komperenhensif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif yang selaras dengan visi dan misi Kota Lubuklinggau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat isu-isu strategis, prioritas program, sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
- c. sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024.

### 1.4 Sistematika Penulisan

RANCANGAN AWAL RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau Tahun 2024 pada dasarnya adalah pengkomunikasian Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Lubuklinggau di bidang Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk selama kurun waktu tersebut. Penyusunan RENJA ini dimulai dengan menjelaskan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan. Selanjutnya menjelaskan gambaran umum/Profil OPD, Data Sasaran dan Capaian Kinerja OPD tahun sebelumnya. Pada Bab-bab selanjutnya akan membahas tentang Isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang dijalankan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk, uraian matrik program dan kegiatan yang disandingkan Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD. Dengan demikian penyajian RANWAL Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk Kota Lubuklinggau Tahun 2023

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :



**BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan teknis dan tujuan dan sasaran RENJA, Program dan Kegiatan.

**BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja tahun 2024

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPPKB Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Penduduk Kota Lubuklinggau mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu untuk tahun 2024-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis inimerupakan perencanaan jangka menengah DPPKB Kota Lubuklinggau yang berisi gambaransasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi,misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target RENSTRA dimaksud, dilaksanakanmelalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkandalam Rencana Kerja (RENJA) OPD setiap tahunnya. Rencana Kinerja DPPKB Kota Lubuklinggau Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, secara umum kinerja DPPKB tahun 2024 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan. Selama tahun 2024, DPPKB Kota Lubuklinggau telah merencanakan dan melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib yakni: 1) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera; 2) Urusan Keluarga Berencana 3) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Dari ketiga urusan wajib tersebut dijabarkan menjadi 3 (Tiga ) Program dan 14 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh sembilan)



Sub Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2024 .

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPPKB Kota Lubuklinggau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPPKB Tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPPKB Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :



Permasalahan yang dihadapi oleh DPPKB Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Pendudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana Tahun 2024 yakni; 1) masih tingginya angka unmeet need; 2) dan masih kurangnya tenaga PKB/PLKB disetiap kelurahan; 3) Kepesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah dan 4) Usia Pernikahan pertama pada perempuan dibawah 21 Tahun masih tinggi.

Sementara itu program dan kegiatan yang telah mencapai target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam RENJA 2023 adalah; 1) tingkat ketersediaan Kelompok Masyarakat peduli KB; 2) prosentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I; 3) tingkat pelayanan kontrasepsi di bawah target; 4) tingkat ketersediaan pusat informasi dan konseling dan KRR; 5) tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran; serta 6) tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. Adapun program yang melebihi target capaian kinerja yang telah ditetapkan yakni cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah suai 20 tahun.

Menghadapi permasalahan tersebut DPPKB Kota Lubuklinggau telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Bekerjasama dengan instansi daerah lainnya yang terkait, seperti DPRD, Disnaker, Disperindag, DPUMKM, untuk merancang program dan kegiatan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan;
- Membuat program dan kegiatan yang responsive gender;
- Meningkatkan akses sekaligus pemerataan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di kesluruhan wilayah Kota Lubuklinggau;
- Meningkatkan kualitas pelayanan;
- Bekerjasama dengan instansi non pemerintah untuk meningkatkan pelayanan KB yang mandiri;
- Melakukan inovasi program, kreatifitas, loyalitas untuk meningkatkan keikutsertaan pria dan ber-KB.

Selain langkah-langkah tersebut DPPKB Kota Lubuklinggau juga mengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL) serta UPPKA;



- b. Merencanakan program dan kegiatan advokasi KIE untuk remaja guna meningkatkan usia perkawinan pertama;
- c. Menambah program dan kegiatan yang berupa pelayanan rutin mauun momentum untuk meingkatkan prevalensi peserta KB aktif maupun peserta KB baru;
- d. Merencanakan program kegiatan untuk meningkatkan akses serta pemerataan pelayanan KB kepada masyarakat melalui safari atau tim K<sub>b</sub> keliling (TKBK) dan mobil uni pelayanan KB;
- e. Membuat program dan kegiatan yang komprehensif integratif yang diawali dengan konsultasi, informasi, dan edukasi (KIE) baik yang dilakukan oleh petugas maupun PPKBD salah satunya dengan mobil unit penerangan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Perencanaan pelayanan OPD DPPKB Tahun 2023 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arahkebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program Pengendalian Penduduk, Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kota Lubuklinggau saat ini, dan telah menunjukkan hasil-hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2022 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya.

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan DPPKB Kota Lubuklinggau berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk SPM ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau memiliki dua



acuan yaitu ; 1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Pengendalian Penduduk Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

### **2.3.1 Tinjauan Terhadap Sinergisitas Program**

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting di Indonesia seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Dinamika dan kompleksitas kependudukan, seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya.

Pembangunan berwawasan kependudukan sendiri memiliki dua makna. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek pembangunan. Artinya pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Dengan demikian, dalam pembangunan berwawasan kependudukan akan menempatkan penduduk sebagai fokus dari upaya pembangunan sekaligus mendorong partisipasi penduduk dalam pembangunan yang berlandaskan asas kebersamaan dan gotong royong.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi oleh DPPKB Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Pendudukan dan Kependudukan Tahun 2024 yakni; 1) masih tingginya angka unmeet need; 2) dan masih kurangnya tenaga PKB/PLKB disetiap kelurahan.

Permasalahan tersebut berdasarkan analisis yang dilakukan disebabkan oleh beberapa kelemahan yakni sebagai berikut:

1. Kurangnya tenaga lini lapangan yaitu penyuluh lapangan KB atau petugas penyuluh lapangan KB (PLKB/PKB);
2. Mutu dan kualitas serta informasi yang dikembangkan yang belum optimal;
3. Belum adanya sarana dan prasarana terutama yang berteknologi tinggi;
4. Kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola program Pengendalian Penduduk, kependudukan dan Keluarga Berencana secara kualitas dan kuantitas masih belum memadai.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam melaksanakan tugasnya DPPKB Kota Lubuklinggau berfungsi dalam pepertanggungjawaban kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Rancangan RKPD Kota Lubuklinggau. Dengan mempertimbangkan hal di atas, penyusunan RENJA DPPKB 2024 ini mesti dengan cermat mengakomodir program-program dan kegiatan yang bisa mewujudkan keinginan tersebut sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan/prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan tahun 2023 yang akan dilakukan oleh OPD dibandingkan dengan Rancangan RKPD Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Visi, Misi DPPKB Kota Lubuklinggau**

##### **VISI**

Visi DPPKB Kota Lubuklinggau dirumuskan dengan memperhatikan Visi Pemerintah Kota Lubuklinggau yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 yakni

***“Terwujudnya Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan yang Madani.”***

Berdasarkan pada visi tersebut maka DPPKB Kota Lubuklinggau mempunyai visi yakni

***“Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”***

##### **MISI**

Misi disusun dengan memperhatikan arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan visi Pemerintah Kota Lubuklinggau, kondisi umum daerah serta kontinuitas perencanaan tahun sebelumnya. Oleh karena itu DPPKB Kota Lubuklinggau menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan melalui keluarga kecil bahagia sejahtera;
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat meunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RENJA DPPKB Kota Lubuklinggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Setiap wilayah kelurahan mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas;
- Setiap kecamatan memiliki Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) yang aktif;



- Seluruh tempat pelayanan KB memberi promosi, dan konseling kesehatan reproduksi.
1. Menata kembali pengelolaan program Pengendalian Penduduk, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
    - Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program dan kegiatan yang terintegrasi dengan hasil yang jelas;
    - Pengelolaan program dan kegiatan di setiap kecamatan mendapatkan fasilitas advokasi dan supervisi;
    - Setiap kecamatan dan kelurahan memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja.
  2. Memperkuat sumber daya manusia;
    - Setiap kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PPLKB yang terlatih;
    - Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola program dan kegiatan;
    - Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai.
  3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
    - Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
    - Setiap keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menjadi anggota kelompok UPPKS dan memiliki usaha produktif;
    - Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
    - Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan Kelompok UPPKS.
  4. Meningkatkan pembiayaan program dan kegiatan;
    - Program Pengendalian Penduduk, kependudukan dan Keluarga Berencana memperoleh prioritas penganggaran dan daerah;
    - Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program dan kegiatan terutama untuk keluarga miskin;
    - Tersedianya alat kontrasepsi swasta dengan harga terjangkau.



### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan tersebut diatas maka diuraikan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan
1.	Peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk	<p>Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB sesuai Kearifan Lokal</li> <li>2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</li> </ol>
2.	Menurunkan kuantitas dan meningkatkan kualitas partisipasi keluarga terutama keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan pemberdayaan ekonomi keluarga	<p>Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</li> </ol> <p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kelaurga Sejahtera Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Kelaurga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</li> <li>2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ol>



		<p>(BKB,BKL,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</p> <p>3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</p> <p>4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKA,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</p> <p>5. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKA)</p>
3.	Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi kelompok dan Pengendalian Penduduk	<p>Program Pembinaan Keluarga Berencana</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal</p> <p>1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakholder dan Mitra Kerja</p> <p>2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB</p>
4.	Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta penggalakan penggunaan alat kontraasepsi	<p>Program Pembinaan Keluarga Berencana</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal</p> <p>1. Pengelolaan Operasional dan Sarana dibalai penyuluhan KKBPK</p> <p>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</p> <p>2. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</p>



		3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)
5.	Meningkatkan partisipasi pria dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota 1. Promosi dan Konseling Kesehatan reproduksi, Serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan
6.	Menetapkan penyelenggaraan jaminan pelayanan bagi keluarga miskin	Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota Program Keluarga Berencana 1. Pengendalian Pendistribusian alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
7.	Memantapkan mekanisme operasional sebagai manajemen operasional program di lini lapangan	Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini lapangan oleh PKB/PLKB 2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 3. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
8.	Optimalisasi program pendataan keluarga	Program Pengendalian Penduduk Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota



		<p>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga</li> <li>2. Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</li> </ol>
11.	<p>Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas</p>	<p>Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Evaluasi kinerja perangkat Daerah</li> </ol> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> </ol> <p>Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas sumberdaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan</li> <li>2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya</li> </ol> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan</li> <li>4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah</li> </ol> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Mebeleur</li> <li>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor bangunan Lainnya</li> </ol> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</li><li>6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan</li><li>7. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</li></ol>
--	--	--

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana kerja tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Lubuklinggau merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan

Demikian RENJA DPPKB Kota Lubuklinggau Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran (PPAS). Sebagai upaya untuk menciptakan kesinambungan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Lubuklinggau dengan tepat sasaran, menyentuh dan bermanfaat bagi setiap lapisan masyarakat, serta dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja seluruh pegawai DPPKB Kota Lubuklinggau.

Lubuklinggau, 04 Agustus 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KOTA LUBUKLINGGAU**



**Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19830710 200112 2001**







Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renstra OPD) Tahun 2023	Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun ( n-2) tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ( n-2) tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renstra OPD) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)/(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)(10/4)
11	<b>WAJIB/URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>									
2.14	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2.17	1.99	2.19	1.78	81.46	2.16	5.9	2.7
		Angka Kelahiran Kasar (CBR)	17.5 Per1000 pddk	19.24 Per1000 pddk	17.6 Per1000 pddk	17.6 Per1000 pddk	100.00	17.2 Per1000 pddk	54	13.51
		% Cakupan PUS yang Istrinya dibawah 20 Tahun	19 %	19.69 %	18.50 %	19.69 %	106.43	18.80 %	58.18	14.545
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	95 %	85 %	90 %	90 %	100.00	95 %	270	67.5
2.14.02.201	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan</b>	95 %	85 %	90 %	90 %	100.00	95 %	270	67.5
2.14.02.201.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen GDPK Kota lubuklinggau	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	3	0.75
2.14.02.202	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jenis informasi data mikro kependudukan keluarga	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100.00	3 Jenis	9	2.25
2.14.02.202.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi mikro keluarga	72 Data	3 Data	72 Data	72 Data	100.00	72 Data	147	36.75
2.14.02.202.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan	95 %	85 %	90 %	90 %	100.00	95 %	270	67.5
2.14.02.202.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data dan informasi mikro keluarga	72 Data	72 Data	72 Data	72 Data	100.00	72 Data	216	54
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase keluarga yang aktif dalam Tribina	79.75 %	53.5 %	62 %	79.2 %	127.74	80 %	212.7	53.175
2.14.03.201	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Cakupan kepersertaan BKR diwilayahnya	60 %	91.19 %	55 %	48.96 %	89.02	65 %	205.15	51.2875
2.14.03.201.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder aktif dalam promosi BKR	28 Orang	19 Orang	25 Orang	18 Orang	72.00	34 Orang	71	17.75
2.14.03.201.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang terlayani KIE	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	100.00	8 Kec	24	6
2.14.03.201.08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah kecamatan yang menerima BOKB	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	100.00	8 Kec	24	6
2.14.03.202.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Cakupan anggota BKL yang ber KB	75 %	77.76 %	74 %	74 %	100.00	75 %	226.76	56.69
		Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 Sektor	5 Sektor	5 Sektor	5 Sektor	100.00	5 Sektor	15	3.75
2.14.03.202.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00	100 %	300	75
2.14.03.202.04	Penggerakan Kader Institutasi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah institusi masyarakat peduli KB aktif	72 PPKBD	72 PPKBD	72 PPKBD	72 PPKBD	100.00	72 PPKBD	216	54
		Rasio PKB/PLKB	2.60 %	2.60 %	2.60 %	2.60 %	100.00	2.60 %	7.8	1.95
2.14.03.203	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00	100 %	300	75
2.14.03.203.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	26.00 %	28.50 %	25.50 %	27.29 %	107.02	26.50 %	82.29	20.5725

2.14.03.203.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Kecamatan yang tersosialisasi Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	100.00	8 Kali	24	6
2.14.03.203.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	3	0.75
2.14.03.203.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Kelompok yang terlayani PIK Remaja Tumbuh/Tegak	24 Klp	15 Klp	21 Klp	18 Klp	85.71	21 Klp	54	13.5
2.14.03.203.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah peserta KB DO	2700 Dropout	3000 Dropout	2800 Dropout	3547 Dropout	126.68	2800 Dropout	9347	2336.75
2.14.03.203.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Akseptor KB baru yang mendapatkan pelayanan	110 Akseptor MO	80 Akseptor MO	100 Akseptor MO	73 Akseptor MO	73.00	100 Akseptor MO	253	63.25
		% Ketersediaan Petugas pelayanan KB	100 %	95 %	96 %	94 %	97.92	100 %	289	72.25
		% Klinik keluarga berencana terintegrasi dengan sistem pembiayaan	88 %	82 %	86 %	84 %	97.67	90 %	256	64
2.14.03.204	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	" Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal , non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan "	3 Sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah	100.00	3 Sekolah	9	2.25
2.14.03.204.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kapung KB yang aktif	11 Kampung KB	8 Kampung KB	10 Kampung KB	9 Kampung KB	90.00	12 Kampung KB	29	7.25
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80 %	76.95 %	77 %	62.48 %	81.14	80 %	219.43	54.8575
2.14.04.201	<del>Pelaksanaan Pembinaan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</del>	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	95 %	85 %	90 %	90 %	100.00	95 %	270	67.5
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga Pra KS/KS 1 yang ikut kelompok UPPKS	69 %	83.11 %	73 %	83.92 %	114.96	70 %	237.03	59.2575
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Peserta Kelompok BKB	66 %	59.46 %	65 %	51.95 %	79.92	66 %	177.41	44.3525
		Cakupan anggota BKB yang ber KB	89 %	85.07 %	88 %	77.7 %	88.30	90 %	252.77	63.1925
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	% PIK yang Memiliki Pengelola Terlatih	62 %	44.11 %	54 %	46 %	85.19	70 %	160.11	40.0275
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan peserta kelompok BKL	65 %	77.76 %	64 %	52.98 %	82.78	66 %	196.74	49.185
		Cakupan anggota BKL yang ber KB	75 %	73 %	74 %	74 %	100.00	75 %	222	55.5
2.14.04.201.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PPKS,PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Stakholder aktif dalam promosi BKR	28 Orang	28 Orang	25 Orang	25 Orang	100.00	25 Orang	78	19.5
		Cakupan kepersertaan BKR diwilayahnya	60 %	91.19 %	55 %	48.96 %	89.02	65 %	205.15	51.2875
2.14.04.202.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kegiatan Harganas yang diikuti	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00	3 Kegiatan	9	2.25
2.14.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00	100 %	300	75
2.14.01.201	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00	100 %	300	75
2.14.01.201.01	Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100.00	3 laporan	9	2.25
2.14.01.201.7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100.00	3 Laporan	9	2.25
2.14.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi keuangan	90 %	90 %	90 %	90 %	100.00	90 %	270	67.5
2.14.01.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja gaji, tunjangan dan TPP	90 %	90 %	90 %	90 %	100.00	90 %	270	67.5
2.14.01.2.05	Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumberdaya	Tingkat Kedispiln aparaturn	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00	100 %	300	75

2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas siap pakai	54	stel	54	stel	54	stel	54	stel	100.00	54	stel	162	40.5
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang ikut bimtek	3	Org	3	Org	3	Org	3	Org	100.00	3	Org	9	2.25
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	300	75
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	10	Jns	10	Jns	10	Jns	10	Jns	100.00	10	Jns	30	7.5
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum Harian	50	Org	50	Org	50	Org	50	Org	100.00	50	Org	150	37.5
		Alat Tulis Kantor	804	Item	804	Item	804	Item	804	Item	100.00	804	Item	2412	603
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	9	item	8	Item	600	Lembar	8	Item	1.33	600	Lembar	616	154
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20	bacaan	20	bacaan	20	bacaan	20	bacaan	100.00	20	bacaan	60	15
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	300	75
2.14.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	300	75
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebeleur	8	Unit	5	Unit	8	Unit	6	Unit	75.00	8	Unit	19	4.75
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Unit	5	Unit	6	Unit	5	Unit	83.33	6	Unit	16	4
2.14.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	300	75
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpenuhi	285	Lembar	285	Lembar	285	Lembar	285	Lembar	100.00	285	Lembar	855	213.75
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	300	75
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorium jasa administrasi Keuangan, Honorarium Pekerja Harian Lepas, Honorarium Jaga malam, Honorarium Clening Service	15	Orang/Bulan	15	Orang/Bulan	15	Orang/Bulan	15	Orang/Bulan	100.00	15	Orang/Bulan	45	11.25
2.14.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	300	75
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	STNK dan KIR Kendaraan dinas	10	mobil	10	mobil	10	mobil	10	mobil	100.00	10	mobil	30	7.5
			55	motor	55	motor	55	motor	55	motor	100.00	55	motor	165	41.25
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atatu lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dan Bahan Bakar Minyak	65	Unit	65	Unit	65	Unit	65	Unit	100.00	65	Unit	195	48.75
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/ rutin berkala gedung kantor	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	100.00	16	Unit	48	12
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Kantor	100	%	100	%	100	%	100	%	100.00	100	%	300	75

Tabel 2.2  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA LUBUKLINGGAU**

NO	SASARAN	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n-n)	( Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n-n)	( Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dari	Rata- rata jumlah anak perkeluarga			<b>2.21</b>	2.19	2.17	<b>2.16</b>	1.9912	1.7840	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	
		<i>Angka Kelahiran Kasar (CBR)</i>			18.02	17.6	17.5	17.20	18.02	17.6	18.03	17.02	
		<i>Persentase peserta KB aktif (CPR)</i>			75.50	76	76.5	77.00	77.06	78.56	77.00	77.00	
		<i>% Cakupan PUS yang Istrinya dibawah 20 Tahun</i>			20	19	18.5	18	19.69	19.69	18	18	
	Meningkatnya kesertaan KB baru	<i>Persentase peserta KB baru</i>			66.1	66.51	67.03	65.69	43.987	52.64	65.69	65.69	
		Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)			10.92	10.52	10.18	9.88	11.32	11.26	9.88	9.88	
		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)			29.5	30	30	31	31.43	30.22	31	31	
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan			100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi			25	25.5	26	26.5	28.5	27.29	26.5	26.5	
	Meningkatnya Kompetensi SDM Pelayanan KB	<i>Persentase Ketersediaan Petugas Pelayanan KB</i>			94	96	98	100	95.58	94.2	100	100	

	Meningkatnya mekanisme Pembiayaan	<i>% Klinik Keluarga Berencana terintegrasi dengan Sistem</i>			84	86	88	90	83.33	84	90	90	
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung	<i>Persentase kecukupan Sarana &amp; Prasarana Pendukungn pelayanan kb</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Peran Serta StakeHolder	<i>Jumlah MoU/Kerjasama Penyediaan Pusat</i>			4	5	6	6	2	4	6	6	
		<i>Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8</i>			77	78	80	80	76.95	62.48	80	80	
		<i>Persentase Data KKBPk yang akurat dan tepat waktu</i>			90	90	95	95	100	100	95	95	
	Meningkatnya ketersediaan SDM penyuluh	<i>Rasio PKB/PLKB</i>			2.6	2.6	2.6	2.6	100	1	2.6	2.6	
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	<i>% Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan</i>			90	90	95	95	100	100	95	95	
	Meningkatnya Kelompok peduli KB	<i>1. Jumlah kampung KB yang Aktif</i>			9	10	11	12	8	9	12	12	
		<i>2. Cakupan PUS di poktan KB berKB</i>			18	20	22	23	18	18	23	23	
	Meningkatnya Peran Serta Keluarga Dalam Bina Keluarga	<i>% Keluarga yang Aktif dalam Tribina</i>			54	62	65	68	75.3	79.29	68	68	
	Meningkatnya Peran Kader/Penyuluh dalam BKR	<i>Jumlah Stakeholder Aktif dalam Promosi BKR</i>			22	25	28	31	19	15	31	31	

		<i>Cakupan Kepesertaan BKR di Wilayahnya</i>			54	55	60	65	45	48.96	65	65	
	Peran Serta Masyarakat dalam Bina Keluarga	% Cakupan peserta kelompok BKB			64	65	66	66	59.46	51.95	66	66	
		% Cakupan anggota BKB yang ber KB			88	88	89	90	85.076	77,707	90	90	
		% Cakupan peserta kelompok BKL			63	64	65	66	77.76	52.98	66	66	
	Meningkatnya usaha peningkatan	Keluarga Pra KS/KS 1 yang ikut kelompok UPPKS			72	73	74	75	83.113	83.92	75	75	
	Meningkatnya kualitas pusat informasi kesehatan reproduksi remaja	Persentase Lembaga Pemerintah/Swasta yang memiliki PIK Tahap Tegak			41	54	62	70	38.46	38.46	70	70	
	Meningkatnya Kompetensi Pengelola PIK	<i>Persentase PIK yang memiliki pengelola terlatih</i>			46	54	62	70	44.11	46	70	70	

**Tabel 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
2.14	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
1	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	LLG	95	%		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	LLG	95	%	
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan</b>	LLG	95	%		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan</b>	LLG	95	%	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen GDPK Kota lubuklinggau	LLG	1	Dokumen	31,500,000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen GDPK Kota lubuklinggau	LLG	1	Dokumen	88,067,650
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jenis informasi data mikro kependudukan keluarga	LLG	3	Jenis		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jenis informasi data mikro kependudukan keluarga	LLG	3	Jenis	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi mikro keluarga	LLG	72	Data	567,600,000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi mikro keluarga	LLG	72	Data	47,741,150
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tersedianya Informasi Tentang Pelayanan Bangsa Kencana (F1 Dal dan F2 Klinik)	LLG	2	Informasi Pelayanan	96,442,500	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tersedianya Informasi Tentang Pelayanan Bangsa Kencana (F1 Dal dan F2 Klinik)	LLG	2	Informasi Pelayanan	2,910,000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Laporan Bulanan Keluarga Berencana	LLG	1	laporan	21,005,250	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Laporan Bulanan Keluarga Berencana	LLG	1	laporan	98,400,193
2	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase keluarga yang aktif dalam Tribina	LLG	80.00	%		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase keluarga yang aktif dalam Tribina	LLG	80.00	%	
		Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	LLG	9,88	%			Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	LLG	9,88	%	
		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	LLG	32.00	%			Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	LLG	32.00	%	
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	LLG	26,50	%			Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	LLG	26,50	%	
		Persentase peserta KB aktif (CPR)	LLG	80,10	%			Persentase peserta KB aktif (CPR)	LLG	80,10	%	
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Cakupan kepersertaan BKR diwilayahnya	LLG	60	%		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Cakupan kepersertaan BKR diwilayahnya	LLG	60	%	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder aktif dalam promosi BKR	LLG	28	Orang	94,290,000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder aktif dalam promosi BKR	LLG	28	Orang	4,375,000
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang terlayani KIE	LLG	8	Kec	38,052,000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang terlayani KIE	LLG	8	Kec	25,000,000
							Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruangan	Jenis informasi media elektronik dan media tradisional	LLG	2	Media	70,200,000
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah kecamatan yang menerima BOKB	LLG	8	Kec	2,066,919,000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terselenggaranya rapat koordinasi dan Mini Lokakarya di seluruh Kelurahan	LLG	72	Kelurahan	124,800,000
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	LLG	5	Sektor	24,580,500	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah kecamatan yang menerima BOKB	LLG	8	Kec	324,000,000
							Pengendalian Program KKBPK	Terkendalinya Jumlah Kasus Stunting perkecamatan	LLG	8	Kec	40,000,000
							<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Rasio PKB/PLKB	LLG	2.60	%	

	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB	LLG	100	%		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah kendaraan Akseptor Pelayanan KB (stunting)	LLG	16	unit	480,000,000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah institusi masyarakat peduli KB aktif	LLG	72	PPKBD	49,400,563	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah institusi masyarakat peduli KB aktif	LLG	72	PPKBD	345,600,000	
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	LLG	100	%		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	LLG	100	%		
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	LLG	100	%			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	LLG	100	%		
		% Ketersediaan Petugas pelayanan KB	LLG	98	%			% Ketersediaan Petugas pelayanan KB	LLG	98	%		
		% Klinik keluarga berencana terintegrasi dengan sistem pembiayaan	LLG	88	%			% Klinik keluarga berencana terintegrasi dengan sistem pembiayaan	LLG	88	%		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Ketersediaan alat dan obat Kontrasepsi Pendampingan bagi seluruh Faskes	LLG	24	Faskes	53,103,750	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Ketersediaan alat dan obat Kontrasepsi Pendampingan bagi seluruh Faskes	LLG	24	Faskes	23,842,350	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta MKJP	LLG	11750	Akseptor	33,390,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta MKJP	LLG	11750	Akseptor	300,600,600	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB	LLG	1	Unit	432,819,000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB	LLG	1	Unit	265,024,681	
	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB Baru Pasca Melahirkan	LLG	1300	Akseptor	29,274,000	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB Baru Pasca Melahirkan	LLG	1300	Akseptor	-	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah peserta KB DO	LLG	2600	Dropout	37,236,675	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah peserta KB DO	LLG	2600	Dropout	-	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Akseptor KB baru yang mendapatkan pelayanan	LLG	120	Akseptor MO	34,539,750	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Akseptor KB baru yang mendapatkan pelayanan	LLG	120	Akseptor MO	-	
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	"Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan	LLG	3	Sekolah		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	"Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan	LLG	3	Sekolah		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang aktif	LLG	10	Kampung KB	74,340,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang aktif	LLG	10	Kampung KB	483,000,000	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8	LLG	77	%		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8	LLG	77	%		
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	LLG	90	%		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	% Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	LLG	90	%		
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Cakupan Ketersediaan BKB KIT Stunting,BKL KIT dan Stunting KIT	LLG	32	KIT	35,000,000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Cakupan Ketersediaan BKB KIT Stunting,BKL KIT dan Stunting KIT	LLG	32	KIT	294,000,000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Pelatihan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKL,BKR,PPPKS,PIK-R,UppKA)	LLG	2	Kali	45,000,000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Pelatihan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKL,BKR,PPPKS,PIK-R,UppKA)	LLG	2	Kali	-	
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Cakupan pendampingan Keluarga Stunting ( Calon Pengantin,Bumil, Pasca Salin)	LLG	480	Pendamping	-	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Cakupan pendampingan Keluarga Stunting ( Calon Pengantin,Bumil, Pasca Salin)	LLG	480	Pendamping	1,065,200,000	

	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga( BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Ketersediaan Biaya Operasional Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKR,PPPKS,PIK-R,UPPKA)	LLG	80	Kelompok	35,500,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga( BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Ketersediaan Biaya Operasional Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKR,PPPKS,PIK-R,UPPKA)	LLG	80	Kelompok	19,546,950
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga( BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Lomba BKB,BKL dan UPPKA	LLG	3	Kali	77,000,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga( BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Lomba BKB,BKL dan UPPKA	LLG	3	Kali	39,300,000
		Jumlah Kegiatan Harganas yang diikuti	LLG	3	Kegiatan			Jumlah Kegiatan Harganas yang diikuti	LLG	3	Kegiatan	
		Terlaksananya Promosi dan Penanggulangan Stunting	LLG	8	Kec.			Terlaksananya Promosi dan Penanggulangan Stunting	LLG	8	Kec.	
	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Kelaurga)	Pelatihan Pendidikan Pranikah bagi Catin	LLG	2	Kali	55,050,000	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Kelaurga)	Pelatihan Pendidikan Pranikah bagi Catin	LLG	2	Kali	82,533,450
		Terlaksananya Lomba BKR dan PIK-R	LLG	2	Kali	-		Terlaksananya Lomba BKR dan PIK-R	LLG	2	Kali	-
		Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	LLG	20	sekolah			Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	LLG	20	sekolah	
		jambore ajang Kreatifitas remaja	LLG	1	Kali			jambore ajang Kreatifitas remaja	LLG	1	Kali	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	LLG	100	%		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	LLG	100	%	
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi dan laporan keuangan</b>	LLG	100	%		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi dan laporan keuangan</b>	LLG	100	%	
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	LLG	3	laporan	-	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	LLG	3	laporan	-
	<b>Administrasi Keuangan Pearngkat Daerah</b>	Belanja gaji, tunjangan dan TPP	LLG	90	%		<b>Administrasi Keuangan Pearngkat Daerah</b>	Belanja gaji, tunjangan dan TPP	LLG	90	%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja gaji, tunjangan dan TPP	LLG	90	%	<b>2,182,001,186</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja gaji, tunjangan dan TPP	LLG	90	%	<b>2,017,781,180</b>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas siap pakai	LLG	40	Org	17,010,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas siap pakai	LLG	40	Org	6,450,000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang ikut bimtek	LLG	2	Orang	23,100,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang ikut bimtek	LLG	2	Orang	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	LLG	10	Jns	7,103,250	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	LLG	10	Jns	15,402,800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Konsumsi Makan Minum Rapat Pegawai	LLG	30	orang	52,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Konsumsi Makan Minum Rapat Pegawai	LLG	30	orang	60,536,400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	LLG	600	Lembar	27,342,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	LLG	600	Lembar	18,227,650
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	LLG	20	bacaan	9,450,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	LLG	20	bacaan	9,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	LLG	100	%	210,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	LLG	100	%	231,386,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peemrintah Daerah</b>						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peemrintah Daerah</b>					
	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Jumlah Mebeleur	LLG	8	Unit	34,728,750	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Jumlah Mebeleur	LLG	8	Unit	6,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LLG	6	Unit	52,093,125	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LLG	6	Unit	3,500,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpenuhi	LLG	285	Lembar	2,992,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpenuhi	LLG	285	Lembar	2,850,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	LLG	100	%	35,280,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata pengeluaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	LLG	100	%	27,623,148

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Keuangan Jasa Pendukung administrasi/teknis perkantoran pembayaran honorarium pegawai harian	LLG	15	orang	135,828,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Keuangan Jasa Pendukung administrasi/teknis perkantoran pembayaran honorarium pegawai harian	LLG	15	orang	135,360,000		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	STNK dan KIR Kendaraan dinas	LLG	9,55	mobil,motor	19,950,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	STNK dan KIR Kendaraan dinas	LLG	9,55	mobil,motor	11,063,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	LLG	63	Unit	166,824,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	LLG	63	Unit	120,510,000		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	LLG	16	Unit	21,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	LLG	16	Unit	20,020,000		
	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rutin berkala gedung kantor	LLG	100	%	51,500,000	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rutin berkala gedung kantor	LLG	100	%	50,252,757		
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>4,798,744,613</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>4,942,323,779</b>		
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					<b>2,182,001,186</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					<b>2,017,781,180</b>		
						<b>6,980,745,799</b>						<b>6,960,104,959</b>		



**FORMULIR RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
2.14	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	LLG	94%	%				
		Persentase Data KKBPk yang akurat dan tepat waktu	LLG	95%	%				
2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Tingkat Akurasi Data Profil Kependudukan</b>	LLG	100	%				
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	LLG	1	Dokumen	1,120,350	APBD		
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	LLG	3	Satuan Pendidikan	18,928,200	APBD		
2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jenis informasi data mikro kependudukan keluarga	LLG	3	Jenis				
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	LLG	12	laporan	-	APBD		
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	LLG	3	Dokumen	2,730,000	APBD & DAK NON FISIK		
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	LLG	12	laporan	70,800,000	APBD & DAK NON FISIK		
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	LLG	1	Dokumen	156,078,100	APBD & DAK NON FISIK		
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase Peserta KB Baru	LLG	15	%				
		Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	LLG	16,23	%				
		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	LLG	28,39	%				
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	LLG	25,50	%				
		Persentase peserta KB aktif (CPR)	LLG	57,91	%				
		Persentase Kampung KB Yang Mandiri	LLG	20	%				

2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	LLG	80	%					
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	LLG	2	laporan	80,000,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	LLG	24	unit	288,000,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	LLG	8	laporan	398,778,112	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	LLG	8	laporan	314,800,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik	LLG	6	Dokumen	150,300,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	LLG	5	Dokumen	0	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapat Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	LLG	5	Organisasi	200,059,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Rasio PKB/PLKB	LLG	1.60	Rasio					
2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	LLG	16.00	unit	6,257,250	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	LLG	383.00	Orang	228,000,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	LLG	5	Organisasi	0	APBD			
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	LLG	100	%					
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	LLG	24	laporan	35,060,098	APBD & DAK NON FISIK			

2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	LLG	21000	orang	412,600,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	LLG	8	Unit	395,240,000	DAK FISIK			
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	LLG	800	Akseptor	14,999,750	APBD			
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	LLG	24	laporan	30,550,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	LLG	360	Orang	14,999,750	APBD			
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang Terbentuk di Kampung KB	LLG	52,7	%					
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	LLG	4	Dokumen	4,250,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	LLG	72	laporan	522,384,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	LLG	72	Kampung KB	332,465,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	LLG	60,91	Skala 0-100					
2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Cakupan Kampung KB yang Memiliki UPPKA	LLG	68	%					
		Persentase Keluarga yang Aktif dalam BKR (Tribina)	LLG	82	%					
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	LLG	2	laporan	80,009,750	APBD			

2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	LLG	2	laporan	52,958,300	APBD			
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	LLG	25	Unit	300,000,000	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	LLG	480	Orang	0	APBD & DAK NON FISIK			
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	LLG	80	Kelompok	100,000,000	APBD			
2.14.04.2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Cakupan Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	LLG	40	%					
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	LLG	8	laporan	480,000,000	DAK NON FISIK			
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	LLG	8992	laporan	528,000,000	DAK NON FISIK			
2.14.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	LLG	100	%					
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	LLG	25	Orang/Bulan	2,225,816,509	APBD			
2.14.01.2.05	Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumberdaya	Tingkat Kedisiplinan aparatur	LLG	100	%					
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	LLG	25	Paket	14,625,000	APBD			

2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LLG	3	orang	4,999,750	APBD			
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Umum Perangkat Daerah	LLG	100	%					
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LLG	10	Paket	17,493,900	APBD			
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LLG	10	Paket	7,489,250	APBD			
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	LLG	22	Paket	70,420,200	APBD			
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	LLG	9	Paket	31,365,000	APBD			
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	LLG	20	Dokumen	9,000,000	APBD			
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LLG	40	laporan	199,770,000	APBD			
2.14.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	LLG	100	%					
2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	LLG	1	unit	0	APBD			
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	LLG	9	Unit	15,800,000	APBD			
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	LLG	7	Unit	15,000,000	APBD			
2.14.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	LLG	100	%					
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LLG	285	laporan	1,560,000	APBD			
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LLG	12	laporan	44,220,000	APBD			
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LLG	12	laporan	175,680,000	APBD			
2.14.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	LLG	100	%					

2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LLG	62	unit	14,900,000	APBD			
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	LLG	62	Unit	101,470,000	APBD			
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LLG	30	Unit	19,740,000	APBD			
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Kantor	LLG	100	%	17,348,940	APBD			
						<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5,980,249,700</b>			
						<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,225,816,509</b>			
						<b>-</b>	<b>8,206,066,209</b>			